

PEMANFAATAN NORMA SOSIAL DALAM TATA KELOLA PARIWISATA BERKELANJUTAN: STUDI KASUS AIR TERJUN NYARAI

Hergiansyah^{1(a)}, Jumiati^{2(b)}

^{1,2}Departemen Ilmu Administrasi Negara, Universitas Negeri Padang

^{a)}hergiansyahh09@gmail.com, ^{b)}jumiati@fis.unp.ac.id

INFORMASI ARTIKEL

Article History:

Dikirim:

27-08-2025

Diterbitkan Online:

30-09-2025

Kata Kunci:

Norma, Modal Sosial,
Pariwisata Berkelanjutan

Keywords:

Norms, Social Capital,
Sustainable Tourism

Corresponding Author:

hergiansyahh09@gmail.com

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi dan menganalisis pemanfaatan modal sosial pemerintah daerah dalam mengembangkan pariwisata berkelanjutan dari segi norma di objek wisata Air Terjun Nyarai, Nagari Salibutan, Kabupaten Padang Pariaman. Penelitian ini berfokus pada norma agama, kesusilaan, kesopanan, dan hukum yang belum sepenuhnya dipatuhi. Metode kualitatif pendekatan deskriptif digunakan dalam penelitian ini. Partisipan penelitian diidentifikasi menggunakan teknik *purposive sampling*. Data diperoleh melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi, kemudian dianalisis menggunakan teknik triangulasi sumber. Hasil penelitian menunjukkan bahwa fenomena pemanfaatan norma-norma yang diterapkan, diantaranya norma agama dalam kawasan wisata yang sesuai dengan syariat Islam. Pemanfaatan norma kesusilaan dilihat melalui nilai moral dan etika, pemanfaatan norma kesopanan dilihat dalam tata krama dan rasa hormat, serta penggunaan norma hukum yang diterapkan disesuaikan dengan aturan undang-undang. Keberadaan pemerintah daerah dalam pemanfaatan norma memiliki peranan penting untuk dapat memastikan bahwa norma dan aturan dilaksanakan. Pemerintah Daerah bekerjasama dengan Pokdarwis memberikan edukasi dan sosialisasi kepada pengunjung dengan arahan langsung maupun papan informasi yang tersedia dalam kawasan wisata air terjun nyarai. Dengan metode ini pemerintah daerah dan pokdarwis dapat meminimalisir dan menghindari terjadinya konflik dan meningkatkan keamanan dalam kawasan wisata.

ABSTRACT

This study aims to identify and analyze the utilization of social capital by the local government in developing sustainable tourism in terms of norms at the Nyarai Waterfall tourist attraction, Salibutan Village, Padang Pariaman Regency. This study focuses on religious norms, morality, politeness, and legal norms that have not been fully complied with. A qualitative descriptive approach method was used in this study. Research participants were identified using a purposive sampling technique. Data were obtained through observation, interviews, and documentation, then analyzed using source triangulation techniques. The results of the study indicate that the phenomenon of the utilization of norms applied, including religious norms in tourist areas that are in accordance with Islamic law. The utilization of moral norms is seen through moral and ethical values, the utilization of politeness norms is seen in etiquette and respect, and the use of legal norms applied is adjusted to statutory regulations. The presence of the local government in the utilization of norms plays an important role in ensuring that norms and regulations are implemented. The local government, in collaboration with the Pokdarwis (Tourism Group), provides education and outreach to visitors through direct guidance and information boards available in the Nyarai Waterfall tourist area. With this method, local governments and tourism groups can minimize and avoid conflicts and increase security in tourist areas.

DOI:

<https://doi.org/10.24036/publicness.v4i3.308>

PENDAHULUAN

Sektor pariwisata berperan strategis sebagai pilar penggerak perekonomian. Kehadirannya dapat berkontribusi signifikan terhadap peningkatan pendapatan masyarakat, penciptaan lapangan kerja baru, dan peningkatan kesejahteraan sosial. Sebagai bagian dari sektor jasa, pariwisata bukan hanya tentang keindahan alam atau kekayaan budaya, pariwisata juga membutuhkan pengelolaan yang profesional dan tertata dengan baik. Dalam hal ini, peran pemerintah sangat vital, karena efektivitas kebijakan publik yang diterapkan, pengambilan keputusan yang tepat, dan partisipasi aktif berbagai pemangku kepentingan, seperti pemerintah daerah, pelaku usaha, masyarakat lokal, dan wisatawan, akan sangat menentukan arah dan keberhasilan sektor ini.

Oleh karena itu, keberhasilan pariwisata tidak terlepas dari prinsip-prinsip tata kelola pemerintahan yang baik. Pemerintah harus mampu mengelola potensi pariwisata secara berkelanjutan dengan melibatkan masyarakat sebagai pelaku kunci, bukan hanya sebagai target pembangunan. Partisipasi efektif masyarakat tidak hanya menumbuhkan rasa kepemilikan terhadap destinasi wisata, tetapi juga memperkuat perekonomian dan menciptakan ekosistem pariwisata yang sehat. Sebagaimana ditunjukkan Neto (2003), keberhasilan sektor pariwisata sangat ditentukan oleh integrasi tata kelola yang baik dan manajemen destinasi wisata yang baik. Lebih lanjut, sektor pariwisata berkontribusi signifikan terhadap pengurangan pengangguran dan peningkatan produktivitas nasional, yang pada akhirnya mengarah pada pertumbuhan ekonomi yang lebih merata dan berkelanjutan.

Dalam konteks pengembangan pariwisata, modal sosial merupakan faktor kunci keberhasilan pengelolaan pariwisata (Aji, 2020). Modal sosial merupakan bentuk keterlibatan masyarakat dalam kegiatan pariwisata. Modal sosial terdiri dari unsur-unsur kepercayaan, jaringan, dan norma yang menjembatani kerja sama, memelihara solidaritas, dan menciptakan lingkungan sosial yang kondusif bagi pertumbuhan pariwisata. Modal sosial juga menyediakan peluang bagi masyarakat untuk saling bekerja sama.

Air Terjun Nyarai Nagari Salibutan, Kabupaten Padang Pariaman, merupakan contoh nyata pemanfaatan modal sosial dalam pengembangan pariwisata. Air Terjun Nyarai merupakan objek wisata yang saat ini sedang dikembangkan di bawah pengelolaan Dinas Pariwisata, Pemuda, dan Olahraga Kabupaten Padang Pariaman, dengan mengusung konsep ekowisata. Awalnya, kawasan ini merupakan kawasan penambangan liar yang mengakibatkan kerusakan hutan dan mengancam keselamatan masyarakat sekitar serta ekosistem setempat. Namun, berkat inisiatif masyarakat setempat yang dipimpin oleh Ritno Kurniawan dan rekan-rekannya, serta dukungan pemerintah daerah melalui Dinas Pariwisata, Pemuda, dan Olahraga Kabupaten Padang Pariaman, kawasan ini berhasil ditransformasikan menjadi destinasi wisata berkelanjutan.

Setelah berubahnya kawasan Air Terjun Nyarai menjadi destinasi wisata berkelanjutan tidak terlepas dari peran penting masyarakat dalam membangun dan memanfaatkan modal sosial. Dalam membangun wisata berkelanjutan perlu membentuk Kelompok Sadar Wisata (Pokdarwis), yang dimana di wisata Air Terjun Nyarai terdapat Pokdarwis LA Adventure. Melalui pokdarwis LA Adventure masyarakat secara kolektif berupaya menjaga kelestarian lingkungan, memberikan pelayanan kepada wisatawan serta dapat menerapkan norma-norma yang sesuai. Selain itu, pelatihan pemandu wisata yang difasilitasi oleh Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga Kabupaten Padang Pariaman turut memperkuat kapasitas masyarakat dalam mengelola destinasi wisata secara profesional.

Pengembangan pariwisata di Air Terjun Nyarai merupakan peluang yang sangat baik bagi pemerintah daerah dan masyarakat untuk menjadikannya destinasi wisata berkelanjutan. Keindahan alam dan potensi lingkungan di kawasan ini dapat menarik wisatawan lokal maupun mancanegara. Namun, untuk memaksimalkan potensi ini dan mengembangkannya lebih lanjut, diperlukan perencanaan yang matang dan kolaborasi dari berbagai pemangku kepentingan. Pemerintah daerah berperan penting dalam menyediakan sarana, prasarana, dan kebijakan yang

mendukung pengelolaan pariwisata yang ramah lingkungan dan berkelanjutan.

Lebih lanjut, keberhasilan pengembangan destinasi wisata seperti Air Terjun Nyarai tidak hanya bergantung pada kebijakan dan infrastruktur, tetapi juga dukungan masyarakat sekitar. Aspek penting yang perlu dipertimbangkan adalah penguatan modal sosial. Masyarakat yang saling mendukung dan menunjukkan rasa tanggung jawab terhadap pariwisata berkelanjutan akan menciptakan lingkungan yang kondusif bagi pengembangan pariwisata jangka panjang. Oleh karena itu, penguatan dan pengembangan peran aktif masyarakat dalam menjaga, mengelola, dan promosi kawasan wisata sangat penting untuk mencapai pariwisata berkelanjutan.

Urgensi modal sosial dari segi norma dalam konteks pengembangan wisata berkelanjutan dapat dilihat dari berkembangnya konsep modal sosial yang digunakan. Dalam konteks ini, Wisata Air Terjun Nyarai dapat dipahami sebagai realisasi penerapan unsur modal sosial dari segi norma untuk memberikan gambaran norma yang diterapkan dalam pengembangan wisata dalam upaya merawat integrasi sosial masyarakat. Norma yang mencakup aturan, kebijakan, dan praktik yang diterima dan diharapkan oleh masyarakat, memainkan peran kunci dalam membimbing perilaku individu dan masyarakat dalam sektor pariwisata. Untuk itu sangat dibutuhkan partisipasi berbagai elemen masyarakat untuk dapat menerapkannya.

Pemanfaatan norma untuk pengembangan pariwisata tersebut dapat dilihat dari aturan yang mengatur aktivitas pariwisata. Norma yang diterapkan dapat dilihat dari jenis norma sendiri, diantaranya yaitu norma keagamaan, norma kesusilaan, norma kesopanan dan norma hukum. Pemanfaatan norma dalam kehidupan sehari-hari, termasuk di kawasan wisata, sangat penting untuk menciptakan lingkungan yang tertib dan harmonis. Semua norma ini dapat dimanfaatkan dan diterapkan sesuai dengan peraturan yang berlaku, baik di objek wisata maupun masyarakat sekitar, untuk menciptakan lingkungan yang aman, nyaman, dan saling menghormati.

Meskipun demikian, dalam perjalanan pengembangan wisata Air Terjun Nyarai masih terdapat berbagai tantangan permasalahan yang dihadapi, khususnya terkait dengan pelanggaran norma yang dilakukan. Permasalahan tersebut diantaranya belum sepenuhnya penerapan norma agama diberlakukan seperti masih

adanya wisatawan yang membuka aurat dan pasangan belum menikah yang berduaan dengan pasangannya. Selanjutnya norma kesusilaan yang pernah dilanggar oleh wisatawan asing karena melakukan tindakan yang tidak pantas seperti mengenakan pakaian minim (bikini). Kemudian permasalahan pada norma kesopanan seperti adanya pengunjung yang menghiraukan arahan dari pemandu karena merasa sudah terbiasa menjelajah alam sehingga tidak ingin diiringi oleh pemandu. Sementara itu pada norma hukum juga terdapat permasalahan seperti sebelum wisata dibuka dan diresmikan, masyarakat sekitar wisata melakukan pekerjaan *illegal logging* atau pembalakan liar terhadap kayu di dalam hutan. Sehingga dengan pekerjaan tersebut mengakibatkan banjir dan longsor, dari pekerjaan tersebut bertentangan dengan UU No.18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan, serta pernah terjadi oknum wisatawan yang membawa narkoba ke dalam area wisata, hal tersebut sangat bertentangan dengan Undang-Undang No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Fenomena tersebut menunjukkan bahwa modal sosial saja tidak cukup untuk menjamin keberlanjutan pengelolaan wisata. Perlu intervensi pemerintah dalam bentuk kebijakan yang jelas, regulasi yang tegas, serta mekanisme pengawasan yang efektif untuk menegakkan aturan dan norma yang berlaku. Pemerintah nagari, pemerintah kecamatan hingga pemerintah kabupaten memiliki tanggungjawab untuk mengatur, membina dan mengawasi aktivitas pariwisata di wilayahnya.

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif dengan metode deskriptif. Menurut Moleong (2013:13), penelitian kualitatif adalah penelitian yang bertujuan untuk memahami fenomena yang dialami oleh partisipan penelitian, seperti perilaku, persepsi, dan tindakan, dengan mendeskripsikannya dalam kata-kata dan bahasa, dalam konteks alamiah tertentu. Dalam penelitian ini, peneliti berupaya mengamati, mendeskripsikan, dan memahami norma dimanfaatkan melalui tata kelola pemerintah daerah dalam pengelolaan Wisata Air Terjun Nyarai Nagari Salibutan Kabupaten Padang Pariaman.

Lokasi penelitian berada di Wisata Air Terjun Nyarai Nagari Salibutan, Kecamatan Lubuk Alung, Padang Pariaman pada Juli

sampai Agustus 2024. Informan dalam penelitian ini berjumlah 13 orang, diantaranya Ibu Rukmawati, S.KM., MM selaku Kasi Pengembangan SDM Pariwisata Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga Kabupaten Padang Pariaman, Bapak Jahidir, SH selaku Wali Nagari Salibutan, Bapak Syahrial selaku Wali Korong Gamaran, Bapak Asril Kapalo Mudo selaku Tokoh Niniak Mamak, Bapak Ritno Kurniawan, SP selaku Ketua Pokdarwis LA Adventure, Bapak Azwir Pengelola Wisata Air Terjun Nyarai, Ajo Aidil selaku Pemandu Wisata Air Terjun Nyarai, Akmal selaku Pemandu Wisata Air Terjun Nyarai, Ibu Efi Susanti selaku Pengurus KUPS Bundo Gamaran, Nanda selaku Masyarakat, Saskia selaku Masyarakat, Kristian Giwo Kusanto selaku Pengunjung, dan Akmal Ramadhan selaku Pengunjung. Informan dalam penelitian ini dipilih secara *purposive sampling*. Jenis dan sumber data yang digunakan dalam penelitian ini terdiri atas data primer dan data sekunder. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan tiga cara, yaitu observasi, wawancara, dan dokumentasi. Dalam proses pengujian keabsahan data yang diperoleh dalam penelitian ini, peneliti menggunakan teknik triangulasi sumber, yaitu dilakukan dengan cara memverifikasi data yang diperoleh dari lapangan melalui berbagai sumber.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pemerintahan daerah adalah pengelolaan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah sesuai dengan asas otonomi dan tugas pembantuan. Dengan asas otonomi sebagaimana gubernur, bupati, wali kota, dan perangkat daerah merupakan unsur penyelenggara pemerintahan daerah. Menurut Hoessein (dalam Hanif, 2007), konsep pemerintahan daerah berasal dari terjemahan istilah "local government" yang sebenarnya mengandung tiga makna. Pertama, pemerintahan daerah dapat diartikan sebagai lembaga atau badan yang menjalankan fungsi pemerintahan di suatu daerah. Dalam pengertian ini, pemerintahan daerah merujuk pada badan-badan yang bertanggung jawab untuk mengatur dan mengelola urusan pemerintahan daerah, seperti kepala daerah (gubernur, wali kota, atau bupati) dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD). Mereka memimpin pelaksanaan berbagai kegiatan pemerintahan di tingkat daerah.

Kedua, istilah "pemerintahan daerah" juga dapat merujuk pada kegiatan atau proses pemerintahan yang dijalankan oleh pemerintah daerah. Hal ini tidak hanya merujuk pada siapa yang memimpin, tetapi juga pada apa yang mereka lakukan, seperti merumuskan kebijakan, menyediakan layanan publik, dan mengelola sumber daya daerah. Ketiga, pemerintahan daerah juga dapat diartikan sebagai daerah otonom, yaitu daerah yang diberi wewenang untuk mengatur dan mengelola urusan pemerintahannya sendiri sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dengan demikian, konsep pemerintahan daerah secara umum tidak hanya mengacu pada struktur atau individu yang terlibat, tetapi juga pada kegiatan dan kewenangan yang dimiliki daerah untuk memerintah dirinya sendiri.

Peran Pemerintah Daerah dalam Pengelolaan Pariwisata

Dalam pengelolaan pariwisata, tanggung jawab tidak hanya berada di tangan pemerintah. Pemerintah daerah juga memainkan peran krusial dan harus diimplementasikan melalui kolaborasi dengan masyarakat setempat. Pemerintah daerah berperan penting dalam merancang dan menetapkan kebijakan yang mendukung pengembangan pariwisata di wilayahnya. Lebih lanjut, mereka juga memberikan arahan dan menetapkan peraturan yang menjadi pedoman bagi pengembangan pariwisata, memastikan pembangunan yang tertib, aman, dan berkelanjutan.

Namun, peran pemerintah saja tidak cukup. Menurut Inskeep (2001) dalam Vendra (2023), pengelolaan pariwisata yang baik membutuhkan kerja sama berbagai pihak, atau pemangku kepentingan. Ini termasuk masyarakat lokal yang tinggal di sekitar objek wisata, pelaku usaha seperti penyedia akomodasi atau pariwisata, dan wisatawan yang berkunjung. Semua pihak harus saling mendukung agar pengelolaan pariwisata berjalan lancar dan bermanfaat bagi semua pihak. Ketika semua pihak bekerja sama, pariwisata akan berkembang lebih baik dan berdampak positif bagi perekonomian daerah, sekaligus melestarikan lingkungan dan budaya setempat.

Sebagai bentuk kolaborasi masyarakat bersama pemerintah, pengelolaan wisata dapat menumbuhkan berbagai usaha pendukung pariwisata yang berdampak nyata bagi

perekonomian masyarakat. Dalam kondisi ini menunjukkan adanya arus kunjungan terhadap wisata yang berkelanjutan. Hal ini menunjukkan bahwa dampak ekonomi pariwisata dapat dilihat melalui perubahan aktivitas ekonomi dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Pemerintah daerah yang terlibat langsung dalam pengelolaan ini adalah Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman melalui Dinas Pariwisata, Pemuda, dan Olahraga (Disparpora). Peran pemerintah sangat penting, terutama dalam perencanaan, penyediaan fasilitas pendukung, dan memastikan pengelolaan pariwisata sesuai dengan peraturan. Dalam hal ini, Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman (Disparpora) berperan sebagai fasilitator, membantu, dan mendukung keberhasilan pelaksanaan pengelolaan pariwisata. Salah satu bentuk dukungan yang diberikan adalah pembentukan kelembagaan di tingkat masyarakat, seperti Kelompok Sadar Wisata (Pokdarwis). Kelompok ini bertugas mengelola kegiatan pariwisata, menjaga kebersihan dan kenyamanan objek wisata, serta menjadi penghubung antara wisatawan dan masyarakat setempat.

Melalui kolaborasi antara pemerintah dan masyarakat ini, diharapkan pariwisata di Air Terjun Nyarai dapat terus berkembang secara tertib dan aman, serta memberikan manfaat bagi semua pihak yang terlibat. Pembentukan Pokdarwis ini tertuang dalam Surat Keputusan Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga Nomor: 367.a/SK-DISPARPORA/VII/2024 tentang Penetapan dan Pengelompokan Pokdarwis dalam Pengelolaan Destinasi Wisata. Dari kewenangan yang dimiliki oleh Disparpora ini menjadi langkah penting dalam mengarahkan pembangunan pariwisata agar sesuai dengan nilai dan kebutuhan masyarakat.

Turut sertanya pemerintah dalam pengelolaan pariwisata menjadi faktor penting dalam pengembangan wisata, dengan adanya intervensi pemerintah dalam sektor pariwisata dapat meningkatkan kesadaran masyarakat untuk dapat bersinergi bersama pemerintah untuk meningkatkan pengelolaan pariwisata. Dwiyanto (2006) menyatakan bahwa keberhasilan tata kelola publik sangat bergantung pada sejauh mana pemerintah mampu melibatkan masyarakat dalam proses perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi kebijakan. Oleh karena itu, pemerintah daerah

dituntut untuk membuka ruang dialog yang luas bagi masyarakat, termasuk dalam merumuskan aturan-aturan wisata yang berlandaskan pada norma dan nilai-nilai daerah.

Awal mula dibukanya wisata air terjun nyarai melibatkan berbagai tokoh masyarakat serta pemerintah nagari untuk memusyawarahkan wisata untuk dibuka. Dari informasi yang didapatkan cukup banyak mendapatkan penolakan dari pihak masyarakat, dikarenakan stigma masyarakat terhadap wisata cukup buruk seperti akan menimbulkan orang-orang yang melanggar norma, menghambat ekonomi/ pekerjaan mereka, dan lain sebagainya. Sehingga pendiri wisata sekaligus ketua pokdarwis LA Adventure melalui musyawarah meyakinkan masyarakat bahwa wisata akan memberikan dampak baik terhadap masyarakat dan lingkungan sekitarnya. Musyawarah dan rapat yang melibatkan berbagai tokoh masyarakat dan pemerintah nagari ini sering kali dilaksanakan, tujuannya agar membangun dan menyamakan persepsi masyarakat, hingga akhirnya terbentuk kesepakatan kemudian melakukan koordinasi lanjutan bersama pemerintah kabupaten untuk meresmikan wisata air terjun nyarai.

Ikut sertanya pemerintah daerah Padang Pariaman dalam hal ini Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga dalam pengembangan wisata dapat meningkatkan kesadaran masyarakat untuk bersama-sama meningkatkan pengelolaan wisata air terjun nyarai bersama pemerintah. Pemerintah dapat menjadi jembatan penghubung antara masyarakat setempat dengan masyarakat luas, agar dapat memperkenalkan wisata dari keindahannya sehingga menarik perhatian masyarakat luas untuk dapat berkunjung ke wisata air terjun nyarai. Hal ini akan memberikan dampak signifikan terhadap peningkatan ekonomi masyarakat dengan kehadiran masyarakat luar yang berkunjung ke wisata air terjun nyarai.

Pemanfaatan Norma melalui Peran Pemerintahan Daerah

Norma merupakan aturan tidak tertulis yang mengatur perilaku masyarakat berdasarkan nilai-nilai yang berlaku. Norma ini dapat berupa norma agama, norma kesusilaan, norma kesopanan, maupun norma hukum yang hidup dalam masyarakat. Dalam pengelolaan sektor publik, termasuk pariwisata, norma memiliki peran penting dalam menjaga harmoni sosial dan mencegah terjadinya konflik antar pelaku

wisata. Oleh karena itu, pemerintah daerah sebagai aktor pengelola masyarakat memiliki tanggung jawab untuk memanfaatkan norma agar dapat diterapkan di kawasan wisata.

Menurut Soerjono Soekanto (2006), norma berfungsi sebagai pedoman, pengatur, dan pengendali perilaku individu dalam masyarakat. Norma yang diinternalisasi oleh individu akan membentuk sikap dan perilaku yang sesuai dengan norma yang berlaku. Dalam konteks wisata, norma berperan dalam mengarahkan perilaku wisatawan agar tidak bertentangan dengan budaya lokal, serta menjaga sikap masyarakat lokal agar tetap ramah dan terbuka terhadap pengunjung.

Pemerintahan nagari Salibutan sebagai pemerintah tingkat nagari berkoordinasi langsung dengan pokdarwis LA Adventure sebagai pengelola wisata air terjun nyarai untuk dapat mensosialisasikan langsung kepada pengunjung terkait dengan norma dan berbagai aturan yang berlaku sehingga dari sosialisasi tersebut dapat memberikan pemahaman kepada pengunjung agar dapat mematuhi norma dan aturan dalam kawasan wisata. Sosialisasi tersebut dilakukan dengan cara melakukan *briefing* atau pengarahan di posko sebelum keberangkatan menuju air terjun nyarai. Dalam arahan tersebut disampaikan hal-hal yang boleh dilakukan maupun larangan yang tidak boleh dilakukan. Agar menghindari resiko pelanggaran, maka pengunjung yang berwisata diberikan seorang pemandu. Selain untuk menghindari resiko pelanggaran, pemandu juga sebagai pengarah dan pendamping selama dalam perjalanan agar tidak terjadi cedera terhadap pengunjung, mengingat area wisata yang berada dalam kawasan hutan lindung tentunya keadaan area perjalanan tidak diketahui pengunjung.

Pemanfaatan norma untuk pengembangan pariwisata dapat dilihat dari aturan yang mengatur aktivitas pariwisata. Norma yang diterapkan dapat dilihat dari jenis norma sendiri, diantaranya yaitu norma keagamaan, norma kesucilaan, norma kesopanan dan norma hukum. Pemanfaatan norma dalam kehidupan sehari-hari termasuk di kawasan wisata, sangat penting untuk menciptakan lingkungan yang tertib dan harmonis. Sebagai contoh, norma keagamaan dapat diterapkan pada setiap kegiatan yang sesuai dengan ajaran Islam, seperti menjaga kebersihan, berpakaian sopan, dan menghindari larangan agama. Norma kesucilaan juga berperan dalam membentuk

perilaku masyarakat, seperti bertindak jujur, tidak merugikan orang lain, dan mengambil keputusan yang bijaksana tentang apa yang harus dilakukan atau dihindari.

Selain itu, norma kesopanan terlihat jelas dalam perilaku dan interaksi masyarakat satu sama lain, seperti menggunakan bahasa yang sopan, menghormati orang yang lebih tua, dan menjaga perilaku baik di tempat umum. Sementara itu, norma hukum sangat penting untuk mengatur perilaku masyarakat sesuai dengan hukum dan peraturan yang berlaku, seperti menjaga ketertiban, tidak merusak fasilitas umum, dan mematuhi peraturan daerah di kawasan wisata. Semua norma ini dapat dimanfaatkan dan diterapkan sesuai dengan peraturan yang berlaku, baik di objek wisata maupun masyarakat sekitar, untuk menciptakan lingkungan yang aman, nyaman, dan saling menghormati.

Untuk menghindari terjadinya konflik dalam kawasan wisata, Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman dalam hal ini Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga berkoordinasi dengan Pemerintah Nagari Salibutan bekerjasama dengan Pokdarwis LA Adventure untuk menyusun aturan dan tata tertib yang merujuk pada norma yang berlaku di wisata tetap terjaga. Aturan dan tata tertib yang disusun untuk menjaga norma tersebut dapat disampaikan atau diedukasi melalui sarana papan informasi yang berada di sejumlah titik dalam kawasan wisata, ataupun secara langsung disampaikan oleh pengelola atau pemandu wisata kepada pengunjung. Dengan metode tersebut akan memberikan pemahaman secara tidak langsung kepada pengunjung dengan membaca papan informasi yang tersedia sehingga dengan informasi tersebut dapat meminimalisir hingga menghindari terjadinya pelanggaran.

PENUTUP

Keberadaan pemerintah daerah memiliki peranan penting untuk dapat memastikan bahwa norma dan aturan yang berlaku dalam kawasan wisata diterapkan dan dipahami oleh pengunjung wisata, ini bertujuan agar wisata dapat berjalan dan berkembang secara berkelanjutan. Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman dalam hal ini Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga berkoordinasi dengan Pemerintah Nagari Salibutan bekerjasama dengan Pokdarwis LA Adventure memberikan edukasi dan sosialisasi kepada pengunjung sebelum melakukan perjalanan menuju air

terjun nyarai. Arahkan atau sosialisasi ini dilakukan di posko keberangkatan, selain itu juga tersedia papan informasi terdapat di sejumlah titik strategis dalam kawasan wisata untuk memberikan pemahaman kepada pengunjung secara tidak langsung. Dengan metode ini pemerintah daerah dan pokdarwis dapat memastikan bahwa norma yang berlaku dapat dihormati dan dipahami untuk meminimalisir dan menghindari terjadinya konflik dan meningkatkan keamanan dalam kawasan wisata. Dengan adanya keterlibatan aktif pihak pemerintah daerah dalam pengelolaan wisata air terjun nyarai tidak hanya meningkatkan perkembangan ekonomi, melainkan juga tetap mempertahankan nilai norma yang menjadi identitas wisata dan masyarakat setempat.

DAFTAR PUSTAKA

- Agus Dwiyanto. 2006. Mewujudkan Mewujudkan Good Governance Melalui Pelayanan Publik. Yogyakarta.. Universitas Gajah Mada.
- Aji, R. R., & Visilya Faniza. (2022). Peran Modal Sosial dalam Pengembangan Komponen Pariwisata di Desa Wisata Pentingsari. *Barista: Jurnal Kajian Bahasa Dan Pariwisata*, 9(2), 47–59. <https://doi.org/10.34013/barista.v9i02.703>
- Anjani, F. D., Aribowo, & Subarkah, A. (2020). Modal Sosial Masyarakat dalam Pengelolaan Pariwisata Pantai Muarareja Indah di Kelurahan Muarareja Kecamatan Tegal Barat Kota Tegal. *Jurnal Ilmiah Perlindungan Dan Pemberdayaan Sosial*, 2(2), 103–117.
- Creswell, John W. 2009, “*Research Design Pendekatan Penelitian Kualitatif, Kuantitatif, dan Mixed*”, Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Desa Wisata Nyarai (www.desawisatanyarai.com) diakses pada tanggal 23 Juli 2024
- Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Republik Indonesia (<https://jadesta.kemenparekraf.go.id/desa/nyarai>) diakses pada tanggal 26 Juli 2024
- Moleong, Lexy J. 2013. *Metode Penelitian Kualitatif*. Edisi Revisi. Bandung : PT. Remaja Rosdakarya.
- Musaddad, A. A., Rahayu, O. Y., Pratama, E., Supratiningsih, & Wahyuni, E. (2019). Pembangunan Pariwisata Berkelanjutan di Indonesia. *Dinamika Administrasi: Jurnal Ilmu Administrasi Dan Manajemen*, 2(1), 73–93.
- Neto, Frederico., 2003, *A New Approach to Sustainable Tourism Development: Moving Beyond Environmental Protection*. Desa Discussion Paper, no. 29, United Nations.
- Nurcholis, Hanif. 2007. *Teori dan Praktik Pemerintahan Dan Otonomi Daerah*. Bandung: Grasindo.
- Moleong, Lexy J. 2013. *Metode Penelitian Kualitatif*. Edisi Revisi. Bandung : PT. Remaja Rosdakarya.
- Republik Indonesia. (2013). *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan*.
- Republik Indonesia. (2009). *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika*.
- Sarwono, J. 2006. *Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif*. Graha Ilmu. Yogyakarta.
- Soerjono Soekanto. 2006. *Sosiologi Suatu Pengantar* (Jakarta: Raja Grafindo Persada)
- Syahra, R. (2003). Modal Sosial: Konsep dan Aplikasi. *Jurnal Masyarakat Dan Budaya*, 5(1), 1–22.
- Umami, Z. (2010). Hubungan antara Dukungan Sosial dengan Kepatuhan terhadap Aturan pada Mahasiswa Penghuni Ma’had Sunan Ampel Al-Aly di Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang. Malang.
- Vendra, C. A. A. (2023). Peran Pemerintah Daerah Dalam Mengelola Pendapatan Asli Daerah Dari Sektor Pariwisata

Berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 9 Tahun 2019 Tentang Pajak Daerah. *Unes Law Review*, 6(1). <https://doi.org/10.31933/unesrev>

Widiati, I. A. P., & Permatasari, I. (2022). Strategi Pengembangan Pariwisata Berkelanjutan (Sustainable Tourism Development) Berbasis Lingkungan Pada Fasilitas Penunjang Pariwisata di Kabupaten Badung. *KERTHA WICAKSANA*, 16(1), 35–44. <https://doi.org/10.22225/kw.16.1.2022.35-44>